

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, kerja sama pertukaran informasi antara NCB Interpol Indonesia dan NCB Interpol Kamboja dalam penanganan WNI korban perdagangan manusia eksploitasi kerja paksa *online scam* telah berlangsung melalui hubungan antarlembaga kepolisian yang difasilitasi oleh Interpol sebagai institusi internasional. Hubungan ini tercapai melalui pertukaran informasi mengenai identitas korban, lokasi *scam centers*, perkembangan kasus, proses penyelidikan, hingga proses repatriasi terhadap korban. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama tidak selalu bergantung melalui diplomasi formal antarpemerintah pusat, namun dapat berjalan secara operasional melalui jaringan antarlembaga pemerintah yang memiliki kesamaan fungsi dan teknis. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Interpol memiliki peran dalam peningkatan efektivitas kerja sama melalui penyediaan sistem komunikasi, prosedur pertukaran informasi, dan jaringan koordinasi internasional. Adanya sistem komunikasi I-24/7 mengindikasikan bahwa penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cepat sehingga mendukung identifikasi korban, pelacakan pelaku, maupun koordinasi tindakan penegakan hukum antara Indonesia dan Kamboja. Dengan demikian,

temuan penelitian memperlihatkan bahwa institusi internasional mampu memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Hambatan dari kerja sama ini berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi, ketidakmerataan penugasan atase kepolisian, kompleksitas jaringan perdagangan manusia yang terorganisir dan sebagainya. Kerja sama ini menunjukkan bahwa kedua negara berupaya untuk menangani perdagangan manusia yang bersifat transnasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia dan Kamboja memiliki kesamaan kepentingan yang kemudian hal ini mendorong kedua negara untuk memperkuat koordinasinya. Dengan demikian, berdasarkan kerangka berpikir teori liberalisme institusionalis, kerja sama pertukaran informasi ini menunjukkan bahwa institusi internasional berperan penting dalam memfasilitasi kolaborasi untuk bersama-sama menangani kejahatan transnasional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan langsung antarlembaga pemerintah menjadi faktor penting dalam mempercepat pertukaran informasi dan mendukung respons operasional terhadap kasus kerja paksa *online scam*. Dengan demikian, penting untuk dikembangkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pertukaran informasi, dan juga memperkuat koordinasi lintas lembaga agar

penanganan korban kerja paksa *online scam* ini dapat dilakukan secara lebih efektif di masa mendatang. Melalui mekanisme pertukaran informasi yang baik, Interpol Indonesia dan Interpol Kamboja dapat meningkatkan efektivitas identifikasi terhadap korban, lokasi *online scam*, proses repatriasi, dan juga pengungkapan modus operandi maupun karakteristik jaringan perdagangan manusia, sehingga perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban perdagangan manusia eksploitasi kerja paksa di Kamboja ini dapat terlaksana dengan baik.

4.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian ini, NCB Interpol Indonesia dan NCB Interpol Kamboja dapat mempertimbangkan pembentukan mekanisme khusus yang menekankan pada penanganan perdagangan manusia eksploitasi kerja paksa *online scam* guna merespons dengan lebih cepat laporan-laporan yang ada. Dalam hal ini, Polri dapat bekerja sama dengan penegak hukum terkait untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan bertindak tegas terhadap jaringan perekrut yang tersebar di Indonesia. Selain itu juga dapat dilakukan penjagaan dengan ketat di setiap imigrasi maupun perbatasan Indonesia untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI dan pihak terkait lainnya perlu memperkuat mekanisme perlindungan WNI yang menjadi korban seperti percepatan terbitnya dokumen perjalanan, maupun optimalisasi proses repatriasi agar korban dapat segera mendapatkan perlindungan dan penanganan yang sesuai setelah berhasil diselamatkan. Selain itu pemerintah dapat meningkatkan edukasi mengenai modus perekrutan kerja ilegal dan mengenali ciri-cirinya. Adanya edukasi dan sosialisasi terkait hal ini juga diharapkan bahwa masyarakat dapat benar-benar memahami akan resiko dan bahayanya bekerja di luar negeri dengan cara yang tidak resmi atau ilegal. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji mengenai penanganan perdagangan manusia menggunakan perspektif teori lain sehingga dapat memberikan

pemahaman yang komprehensif mengenai kerja sama dalam melindungi korban perdagangan manusia di era teknologi ini dan agar memberikan analisis yang lebih luas mengenai dinamika kerja sama antarlembaga penegak hukum dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks